

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Percaturan Timur Tengah selalu saja dinamis dan berkembang setiap saat. Timur Tengah sebagai kawasan yang dikenal kaya raya akan sumber daya alam minyak, yang merupakan sumber energi vital bagi kehidupan dalam perkembangannya di kawasan ini sering terjadi konflik, baik itu konflik antar negara-negara Timur Tengah sendiri maupun konflik yang melibatkan negara-negara barat yang notabene negara-negara maju kapitalis. Negara-negara yang mempunyai kepentingan pribadi dibalik keterlibatannya dalam konflik di kawasan ini.

Konflik terakhir yang terjadi adalah peristiwa invasi AS dan negara-negara sekutunya terhadap Irak pada pertengahan tahun 2003. Invasi ini dilakukan dengan alasan sebagai pencarian senjata pemusnah massal dan disebut-sebut sebagai operasi pembebasan rakyat Irak dari rezim otoriter Saddam Hussein.

Melihat realita masyarakat Irak yang plural dan heterogen baik etnis, agama, maupun ideologi politik maka upaya pembentukan pemerintahan baru pasca invasi bukanlah perkara yang mudah. Masing-masing kelompok menuntut peran yang lebih besar dalam pemerintahan Irak pasca Saddam Hussein tersebut. Hal inilah yang dianggap sebagai batu sandungan utama dalam pembentukan Irak baru pasca Saddam Hussein. Sejumlah pertanyaan seperti siapa kelak yang berkuasa, dari kelompok mana. Apakah Sunni (sebagai kelompok minoritas yang

berkuasa di era Saddam), ataukah Syiah (yang merupakan kelompok mayoritas) atau malah minoritas Kurdi kerap mengemuka dan senantiasa menarik untuk ditunggu jawabannya.

Ditengah ketidakpercayaan rakyat Irak terhadap pemerintahan transisi bentukan AS, dan kian meningkatnya eskalasi perebutan pengaruh serta peran yang lebih dominan diantara mereka dalam pemerintahan baru pasca Saddam Hussein, penulis merasa tertarik untuk menulis **“UPAYA KELOMPOK SUNNI DALAM MEMPERTAHANKAN POSISI POLITIK DI IRAK PASCA INVASI AS”** sebagai judul skripsi ini.

#### **B. Tujuan Penelitian.**

Disamping sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulisan karya ilmiah ini juga mempunyai tujuan untuk menggambarkan upaya kelompok Sunni dalam mempertahankan posisi politik di Irak pasca invasi AS pertengahan tahun 2003.

#### **C. Latar Belakang Masalah.**

Irak merupakan sebuah daerah yang banyak disebut dalam pelbagai kitab suci, terutama Taurat (Perjanjian Lama), Injil (Perjanjian Baru), dan dalam Al Quran. Bagi umat Islam, Irak menempati sebuah negeri yang istimewa karena di negeri tersebut, terhampar berbagai saksi kejayaan Islam masa lalu, dan pernah

lahir para pahlawan, ulama dan ilmuwan besar kenamaan.<sup>1</sup> Irak merupakan bangsa yang memiliki peradapan paling kuno di dunia. Negara yang terletak diantara lembah sungai Euprat dan Tigris, tepatnya disebut Mesopotamia Kuno. Merupakan asal berbagai peradapan kuno seperti Assyria dan Akkad.

Pada abad ketujuh masehi saat Dinasti Sassaniah kalah ditangan umat Islam, rakyat Irak sama seperti kawasan Iran memeluk Islam dan Irak segera memerankan peran pentingnya di dunia Islam. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah (8 M ) Baghdad menjadi ibukota Irak serta menjadi kota paling besar setelah Konstantinopel, saat inilah puncak kekuatan dan peradapan Islam. Pada sekitar tahun 1935 M orang-orang Turki Utsmani menjajah Irak sehingga posisi penting negara ini merosot, sampai ketika pemerintah Utsmani tumbang dalam PD I dan berakhirnya imperialisme Inggris, maka pada tahun 1932 Irak secara resmi merdeka.

Irak secara umum dapat dibagi menjadi.<sup>2</sup> *Pertama*, kelompok Sunni (20 persen) yang di era Saddam Hussein menjadi minoritas yang berkuasa dan dominan dalam sistem pemerintahan Irak. *Kedua*, kelompok Syiah sebagai kelompok mayoritas (60 persen) dari seluruh total penduduk Irak. *Ketiga*, kelompok minoritas Kurdi.

Keterpecahan dan pembagian geografis yang terkait dengan pembagian sekte dan etnis di Irak sudah terjadi sejak zaman Utsmani. Di Irak zaman itu terbagi menjadi tiga propinsi ; Basra (selatan), Baghdad (tengah) dan Mosul (utara). Basra didominasi oleh kaum Syiah, Baghdad dan Mosul didominasi kaum

---

<sup>1</sup> 'Allaudin Al Mudarris, *Huru-Hara Irak : Isyarat Akhir Zaman*, Cahaya Hikmah, Yogyakarta, 2004.

<sup>2</sup> [www.bbc.com/seksi-indonesia/Irak/html](http://www.bbc.com/seksi-indonesia/Irak/html). akses 14 Oktober 2005

berkuasa selama tujuh tahun atau tidak. Hasilnya 100 persen memberikan mandat pada Saddam Hussein. Seluruh era yang oleh AS disebut-sebut oleh AS sebagai otoritarisme tersebut hendak diakhiri, Saddam Hussein disingkirkan oleh pasukan gabungan pimpinan AS. Pada pertengahan tahun 2003 lalu bersama dengan Inggris dan beberapa negara sekutunya, AS melancarkan serangan militer ke Irak. Selain untuk mencari senjata pemusnah massal yang dituduhkan AS, juga disebut-sebut sebagai operasi pembebasan rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein yang otoriter dan dianggap mengancam proses demokratisasi.

Rencana AS untuk menginvasi Irak mulai santer terdengar pasca serangan 11 September 2001. Suatu peristiwa yang sangat memalukan bagi AS, sebagai sebuah negara super power yang memiliki sistem pertahanan kuat ternyata dapat dibobolkan oleh sekelompok teroris, yang berhasil meledakkan menara kembar World Trade Center. AS yang tidak mau kehilangan muka kemudian mengkampanyekan perang melawan teroris dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam perang global melawan terorisme. Sebagai salah satu negara pemegang hak veto dalam PBB, AS mencoba memaksa Dewan Keamanan PBB untuk mendukung rencananya menginvasi Irak. AS mengatakan bahwa Irak mempunyai hubungan dekat dengan Al Qaeda dan Irak mempunyai senjata pemusnah massal yang dapat mengancam perdamaian dunia.

Meskipun Dewan Keamanan PBB tidak merestui rencana AS serta mendapat protes keras dari masyarakat dunia namun akhirnya AS tetap saja menyerang Irak. Keputusan AS yang kelihatan sangat gegabah dan terburu-buru untuk menyerang Irak memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pengamat.

Dilihat dari infrastruktur militernya Irak sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan AS.

Setelah mengalami kekalahan yang sangat parah saat perang dengan Kuwait pada tahun 1990an dan ditambah lagi dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan PBB (Irak hanya bisa menjual minyak secara terbatas dan juga akibat adanya zona larangan terbang serta dikucilkan dari dunia internasional). Sanksi-sanksi itu membuat Irak tidak dapat mengembangkan perekonomiannya dan tidak dapat pula membangun infrastruktur negara yang hanya berupa sisa-sisa persenjataan dari Perang Teluk II menyebabkan Irak diibaratkan sebagai negara yang tinggal menunggu ajal karena akan diserang AS, negara super power dengan persenjataan lengkap dan armada tempur terlatih yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan yang tersebar di seluruh dunia.

Pada Kamis dini hari tanggal 20 Maret 2003 AS dan Inggris benar-benar membuat sejarah baru dalam hubungan internasional. Tidak kurang dari 40 peluru kendali (rudal) Tomahawk mulai diluncurkan dari Teluk Persia dan Laut Merah oleh AS dan sekutunya untuk menggempur Irak.<sup>3</sup> Dan hanya dalam kurun waktu yang singkat AS dapat memporak-porandakan Irak sekaligus menumbangkan rezim Saddam Hussein yang ditandai dengan perobohan patung Saddam di kota Baghdad pada tanggal 9 April 2003.

Kondisi Irak pasca tumbanganya Saddam Hussein ternyata tidak seperti yang dibayangkan AS sebelumnya. Negara Irak yang terdiri dari banyak suku sangat rentan terhadap ancaman terjadinya perebutan kekuasaan melalui kudeta.

---

<sup>3</sup> Dewi Wulandari, *Kepentingan Minyak Dibalik Invasi AS*, Skripsi Sarjana Takditerbitkan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003 hal. 64-67. Mengutip Majalah TEMPO, 30 Maret 2003, hal. 132-133.

Hal ini bisa terjadi karena adanya keinginan dari tiap suku untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Irak baru. Dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan kelompoknya diatas kepentingan kelompok lain.

AS yang menghendaki sebuah bangunan negara demokrasi pasca Saddam, berusaha menyodorkan nilai-nilai demokrasi versi rakyat AS dan berusaha meminggirkan paham yang selama ini dianut pemerintah Irak, yaitu paham sosialisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai Arab yang dicetuskan oleh pendiri Partai Baath, Michel Aflaq. Selam masa pemerintahannya Saddam menggunakan sentimen keagamaan yang berkembang dalam masyarakat yaitu Islam yang merupakan agama mayoritas di Irak.

Dengan hadirnya demokrasi versi AS, otomatis pola bangunan demokrasi versi rakyat AS setidaknya akan meminimalisasi nilai-nilai Islam dan peran lembaga-lembaga Islam, dengan menggantikan jubah demokrasi yang berbau sekuler. Kelompok Sunni sebagai minoritas yang berkuasa di masa Saddam selama berpuluh-puluh tahun secara psikologis tentu tidak begitu saja rela untuk kehilangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Irak bentukan AS pasca tumbanganya Saddam Hussein.

#### **D. Rumusan Masalah.**

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas pertanyaan yang dapat kita temukan adalah:

Bagaimana upaya kelompok Sunni dalam mempertahankan posisi politik di Irak pasca Invasi AS?

## E. Kerangka Dasar Teori.

Teori merupakan penjelasan paling umum, yang memberitahu kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain digunakan untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi. Dari pengertian ini teori dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan Teori Sistem Politik. Definisi umum Sistem Politik adalah, merupakan sistem interaksi atau hubungan dalam masyarakat melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

Easton dikenal sebagai teoritis pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam ilmu politik. Menurut pendekatan ini, setiap *sistem* tentu memiliki sifat (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) sistem itu mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.<sup>5</sup>

Berdasar definisi Easton tentang politik, sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan (a) alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan ), yang (b) alokasinya

---

<sup>4</sup> Moehtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.

<sup>5</sup> Moehtar Mas' oed, Colin McAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Fungsi-fungsi input terdiri atas;

- a. Sosialisasi politik dan rekrutmen. Sosialisasi politik adalah merupakan suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik dalam suatu masyarakat. Sedangkan rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan
  - b. Artikulasi kepentingan. Cara atau prosedur yang lazim ditempuh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya adalah dengan cara mengartikulasikan atau mengemukakan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kabijaksanaan.
  - c. Agregasi kepentingan. Fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijakan umum, atau disebut juga fungsi menampung kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan.
  - d. Komunikasi politik Komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi input, pada hakekatnya menggambarkan proses penyampaian informasi-informasi.
- b) Output adalah merupakan hasil dari konsekwensi bekerjanya suatu sistem politik. Hasil atau konsekwensi dari sistem politik tersebut

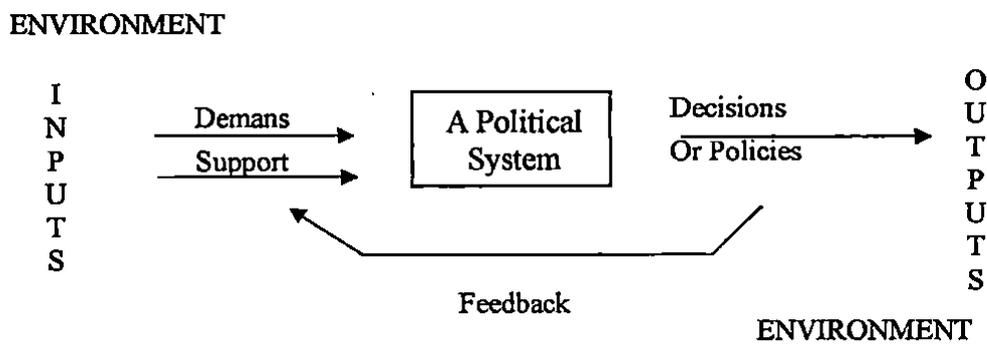
berupa keputusan-keputusan yang sifatnya otoritatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Fungsi-fungsi output terdiri atas; Pembuatan peraturan. penerapan peraturan. Ajudikasi peraturan.

3. *Diferensiasi dalam suatu sistem*, Seperti akan kita lihat nanti, lingkungan itu memberikan energi untuk mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energi. Dengan cara ini sistem dapat melakukan kegiatannya. Dan sistem itu menghasilkan output yang berbeda dengan input yang diperoleh dari lingkungannya. Sehingga kita bisa memakainya sebagai hipotesa bila suatu sistem politik harus menjalankan pekerjaan bermacam-macam tetapi dalam waktu yang terbatas , maka struktur-strukturnya harus mengenal diferensiasi minimal. Kenyataannya, secara empiris tidak mungkin ditemukan suatu sistem politik di mana unit-unitnya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sama pada waktu yang sama. Anggota-anggota dari suatu sistem paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan itu.

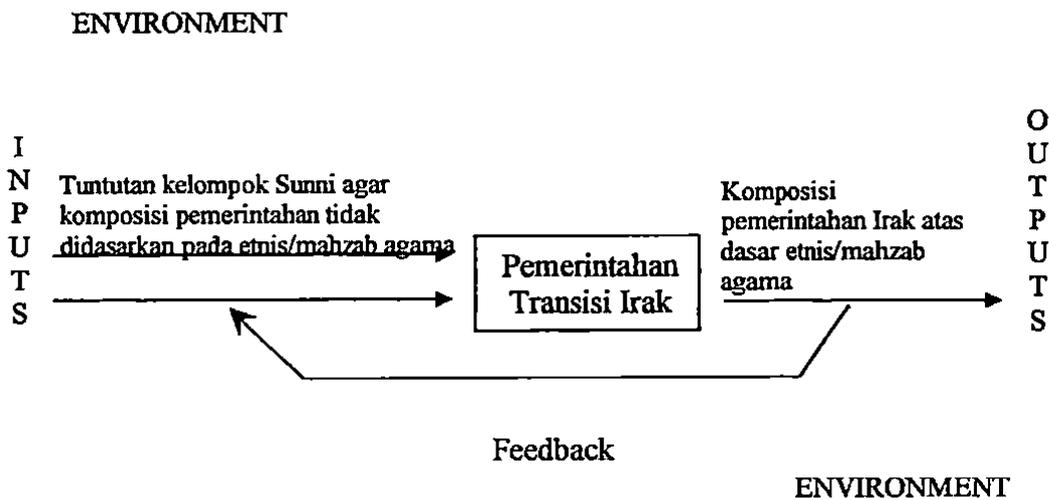
4. *Integrasi dalam suatu sistem*, Fakta tentang diferensiasi ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi penelitian-penelitian sistem politik. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah yang secara potensial bisa merusak integrasi sistem itu. Bila dua atau beberapa unit sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda pada waktu yang sama, bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa menghasilkan output yang tidak menyangkut kepentingan kita? Kita dapat mengajukan hipotesa bahwa bila suatu sistem

berstruktur ingin mempertahankan dirinya, sistem itu harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan otoritatif.

Diagram Sistem Politik David Easton.<sup>8</sup>



Aplikasi Teori



<sup>8</sup> Moehtar Mas'eod, Colin McAndrew. Op.cit hal. 5

Konstelasi politik Irak mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein. Perubahan itu tidak hanya menyangkut semakin longgar dan terbukanya kebebasan masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politiknya, tetapi juga di barengi dengan perubahan politik secara kolektif maupun kelembagaan yang ditandai dengan munculnya partai-partai baru yang menggunakan identitas etnis dan agama sebagai labelnya. Pasca tumbangannya rezim Saddam ada tiga kekuatan besar yang bersaing untuk merebut posisi politik tertinggi di Irak yakni; Syiah, Sunni dan Kurdi.

Pendudukan AS di Irak masih tetap berlangsung pasca penyerangan, mereka membentuk pemerintahan *ad interim* yang diberi nama Dewan Pemerintahan Irak (INC) dan beranggotakan 25 orang yakni; 13 Syiah, 5 Sunni, 5 Kurdi, 1 Turkeministan dan 1 Kristen. Pemerintahan tersebut dinilai sebagai pemerintahan boneka AS, karena disamping dewan ini juga terdapat penguasa AS yang memerintah Irak. Rakyat Irak menyadari betul hal ini dan mereka sama sekali tidak simpatik dengan dewan bentukan AS tersebut.

Dua tahun pasca jatuhnya Saddam Hussein, rakyat Irak melangsungkan pemilihan umum, Ahad, 30 Januari 2005. di hari bersejarah tersebut rakyat Irak memilih 275 anggota Majelis Nasional yang memiliki tugas utama menyusun konstitusi baru dan memilih presiden dan dua wakil presiden. Dalam pemilu kali ini, rakyat Irak diharuskan memilih sekitar 107 kelompok dan partai dengan 7.000 kandidat. Pada hari yang sama dilangsungkan pula pemilihan gubernur di tingkat propinsi serta pemilihan anggota Majelis Kurdistan di daerah otonomi Kurdi.

Kekecewaan kelompok Sunni memuncak ketiga terjadi pembentukan Dewan Transisi Irak, Sunni merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam pembagian etnis/mahzab agama dalam komposisi anggota Dewan Pemerintahan Transisi. Tidak hanya menyangkut jumlah yang dianggap terlalu kecil tetapi juga karena wakil mereka dalam dewan tidak memiliki basis massa dan popularitas dikalangan mereka.

Pasca Saddam, kelompok Sunni berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka dipanggung politik Irak dan selalu bertindak menahan perubahan yang mengancam supremasi kekuasaan mereka. Tentara pendudukan dan Syiah pro-AS dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Sunni di Irak, untuk itulah kelompok Sunni tetap berusaha mempertahankan status (kondisi) yang ada.

#### **F. Hipotesa.**

Sebagai minoritas yang berkuasa di era Saddam Hussein, kelompok Sunni kini menjadi minoritas lemah dan terpinggirkan di era Irak baru pasca tumbangannya Saddam Hussein pasca invasi AS dan sekutunya pada 2003 lalu. Kelompok Sunni berkeinginan tetap eksis dalam panggung politik Irak dengan cara:

1. Demonstrasi-demonstrasi dan aksi kekerasan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang pentingnya peran kelompok Sunni di Irak.
2. Memboikot pemilu demokratis pertama untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 30 Januari 2005.
3. Propaganda para pemimpin Sunni untuk menolak referendum konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2005, dengan

mengatakan bahwa konstitusi itu rekayasa AS dan hanya sangat menguntungkan Syiah dan Kurdi.

#### **G. Metode Penulisan.**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku ilmiah, artikel-artikel majalah atau koran, internet, naskah-naskah dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Sumber data penelitian ini data-data primer dan data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari orang lain dalam bentuk turunan, salinan atau bukan tangan pertama. Dan sumber-sumber sekunder lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

#### **H. Jangkauan Penelitian.**

Penelitian Skripsi ini hanya terbatas pada saat tumbangnya Saddam Hussein pada pertengahan tahun 2003 sampai dengan pra pembentukan pemerintahan baru Irak.

#### **I. Sistematika Penulisan.**

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

Pertama, bab pertama ini merupakan bab Pendahuluan dalam bab ini terdiri dari; Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penulisan, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Kedua, bab kedua ini membahas tentang Garis Besar Sejarah Sunni yang meliputi; Latar Belakang Munculnya Sunni, Perkembangan Sunni di Irak dan Sunni dimasa Saddam Hussein.

Ketiga, bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan tentang Sistem Politik Irak Pasca Invasi berisi tentang; Instabilitas Irak, Hubungan Sunni, Syiah dan Kurdi dan Pembentukan pemerintahan Baru Irak yang meliputi; Pertemuan Kelompok Oposisi, Pembentukan Dewan Pemerintahan Irak dan Penyerahan Kedaulatan.

Keempat, bab ini membahas tentang Upaya Kelompok Sunni Dalam Mempertahankan Posisi Politik Di Irak yang meliputi; Perlawanan Kelompok Sunni Terhadap Tentara Pendudukan, Boikot Kelompok Sunni dalam Pemilu Irak Januari 2005, Konstitusi Irak pasca Pemilu serta Demokratisasi di Irak.

Kelima, merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisa diatas dan sumbangsih terhadap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

bersifat otoritatif (yaitu dikuatkan oleh kekuasaan yang sah) dan (c) alokasi yang otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

David Easton menyatakan bahwa ciri-ciri yang utama dari sistem politik adalah sebagai berikut<sup>7</sup>;

1. *Ciri-ciri Identifikasi*, Untuk membedakan sistem politik dari sistem-sistem lainnya, kita harus mengidentifikasikannya dengan menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit dari unit yang ada di luar sistem itu.

a) Unit-unit sistem politik. Unit-unit adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini berwujud tindakan-tindakan politik.

b) Perbatasan. Yang termasuk dalam suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuat keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal di dalam lingkungan sistem itu.

2. *Input dan output*.

a) Input adalah merupakan masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup sistem politik. Input yang masuk dalam sistem politik dapat dibedakan menjadi dua yakni tuntutan dan dukungan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Mochtar Mas'ood, Colin McAndrew *op.cit* hal. 5-7

Pertarungan mengenai format ideal negara Irak termasuk rancangan konstitusinya memang sangat krusial. Melihat perimbangan kekuatan di Irak saat ini maka hampir bisa di pastikan kelompok Syiah yang tergabung dalam Aliansi Irak Bersatu bakal keluar sebagai pemegang kekuasaan baru di Irak. Kaum Syiah yang menganut paradigma integralistik atau penyatuan agama dengan negara mendesak agar Islam dijadikan sumber hukum utama dalam konstitusi Irak pasca Saddam walaupun bukan satu-satunya sumber hukum.

Sedangkan kelompok Sunni memiliki pandangan sekularistik menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara. Keduanya memiliki wilayah yang berbeda, dimana agama sebagai realitas atau sistem nilai transenden sedangkan negara (politik) merupakan realitas temporal dan duniawi. Baik Sunni maupun Kurdi menginginkan agar Irak mengadopsi ideologi sekuler dalam penyusunan konstitusi baru Irak. Sunni lebih menekankan pemerintahan nasional Irak yang bersatu dan tidak berdasar pada sektarianisme.

Masa lalu yang jaya (masa Saddam berkuasa) bagi kelompok Sunni merupakan motivasi yang lazim untuk tetap mempertahankan keadaan. Lepas dari prediksi maksud dan tujuan AS menginvasi Irak, kelompok Sunni memandangnya sebagai peristiwa yang telah merampas kekuasaan mereka. Dominasi mereka secara otomatis hilang seiring dengan tumbanganya rezim Saddam Hussein. Bentuk pemerintahan baru bentukan yang mempergunakan format komposisi etnis dan agama secara umum menyebabkan kelompok Sunni merasa kecewa berat dan "terpinggirkan" dalam panggung politik Irak